



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Terhadap Penyerapan Anggaran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang

Roh Hatul Qohryzah¹, Muhammad Rivandi²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP, Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Maret 5, 2026

Revised Maret 10, 2026

Accepted Maret 41, 2026

Kata Kunci:

Penyerapan Anggaran,
Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran,
Pemahaman Sistem Prosedur
Pengelolaan Keuangan

Keywords:

*Budget Absorption,
Budget Planning,
Budget Implementation,
Understanding of Financial
Management System,
Procedures*

ABSTRAK

Penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan kemampuan instansi pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling dengan jumlah responden sebanyak 45 orang. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sebaliknya, pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di BPKAD Kota Padang.

ABSTRACT

Budget absorption is an important indicator in assessing regional financial management performance because it reflects the ability of government agencies to realize planned budgets. This study aims to empirically analyze the influence of budget planning, budget execution, and understanding of financial management systems and procedures on the level of budget absorption at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Padang City. This study uses a quantitative approach with a survey method. The sampling technique used was total sampling with a total of 45 respondents. The research data were obtained by distributing questionnaires to employees directly involved in regional financial management. Furthermore, the data were analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software with multiple linear regression analysis methods. The results show that budget planning does not have a positive and significant effect

on budget absorption. Conversely, budget execution has a positive and significant effect on budget absorption. Meanwhile, understanding of financial management systems and procedures does not affect budget absorption at the BPKAD of Padang City.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Roh Hatul Qohryzah
Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP,
Padang, Indonesia
Email: rohhatulqohryzah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan finansial daerah adalah salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan administrasi daerah. Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah di negara ini, pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih besar dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang ada, termasuk dalam hal keuangan. Wewenang tersebut bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pelayanan publik dan mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan cara yang jelas, bertanggung jawab, dan efisien agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat[1]. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam satu periode anggaran tertentu. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merencanakan beragam program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah[2].

Salah satu ukuran yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah rasio penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan sejauh mana anggaran yang sudah direncanakan dalam APBD dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan aktivitas pemerintah daerah. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mengindikasikan bahwa inisiatif pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebaliknya, rendahnya tingkat penyerapan anggaran dapat menghambat pelaksanaan inisiatif pembangunan dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah[3]. Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran di instansi pemerintah daerah. Masalah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah belum berjalan dengan maksimal, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pendistribusian anggaran. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi salah satu penyebab utama rendahnya rasio penyerapan anggaran di instansi pemerintah daerah[4].

Perencanaan keuangan yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi prioritas program pembangunan serta mendistribusikan sumber daya secara efisien agar berbagai aktivitas yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Perencanaan anggaran yang tidak dilakukan secara seksama dapat mengakibatkan perbedaan antara apa yang direncanakan dan yang diimplementasikan, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya pencapaian penggunaan

anggaran[5]. Selain itu, pelaksanaan anggaran juga memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan dalam penggunaan dana. Pelaksanaan anggaran adalah fase penerapan dari rencana keuangan yang telah disusun sebelumnya, mencakup pelaksanaan aktivitas, pengadaan barang dan jasa, serta proses pencairan dana. Jika pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik, maka pencapaian anggaran dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan sehingga tingkat penggunaan anggaran dapat meningkat[6].

Faktor lain yang turut memengaruhi seberapa baik anggaran bisa diserap adalah keterampilan manusia dalam mengelola keuangan daerah. Pegawai pemerintah yang memiliki keahlian dan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah akan lebih berhasil dalam melaksanakan proses penganggaran dengan cara yang efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku[7]. Di samping itu, aturan-aturan serta pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga bisa berdampak pada seberapa besar anggaran dapat diserap. Perubahan dalam regulasi atau implementasi sistem informasi yang belum maksimal dapat menyebabkannya terlambat dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah yang berujung pada rendahnya realisasi anggaran[8]. Pelaksanaan anggaran yang tidak berjalan lancar juga berpotensi mengalami rendahnya angka penyerapan. Jika pelaksanaan kegiatan dan pemakaian anggaran tidak dilakukan secara efisien, maka realisasi anggaran akan terhambat dan mengganggu pencapaian sasaran pembangunan daerah[9]. Selain itu, perencanaan anggaran yang tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai juga bisa memengaruhi seberapa baik anggaran bisa diserap. Manusia yang terampil dalam pengelolaan keuangan daerah akan lebih mampu melaksanakan kegiatan anggaran dengan cara yang lebih efektif dan efisien[10].

Faktor lain yang memengaruhi tingkat penyerapannya anggaran adalah cara pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jika pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan dengan baik, hal ini bisa menghalangi pelaksanaan program pemerintah daerah, sehingga dana yang telah disiapkan tidak bisa digunakan secara maksimal[11]. Selain faktor-faktor tersebut, komitmen dari organisasi, peraturan yang ada, serta kemampuan sumber daya manusia juga memainkan peranan dalam seberapa jauh anggaran dapat diserap oleh lembaga pemerintah daerah[12]. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem kontrol internal yang diterapkan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pengendalian internal yang baik akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah[13].

Selain itu, penerapan standar akuntansi publik serta mutu laporan keuangan memainkan peranan krusial dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja unit pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi publik akan memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah[14]. Walaupun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di instansi pemerintah daerah, hasil-hasil tersebut masih menunjukkan variasi dalam temuan mengenai variabel yang paling signifikan terhadap penyerapan anggaran. Beberapa studi mengindikasikan bahwa elemen perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memiliki dampak besar terhadap penyerapan anggaran, sementara penelitian lain mengemukakan bahwa kompetensi tenaga kerja, lingkungan birokrasi, serta regulasi juga berkontribusi pada tingkat penyerapan anggaran. Variasi hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut, khususnya di instansi pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda.

Selain itu, sebagian besar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih fokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara umum, sementara kajian yang khusus meneliti penyerapan anggaran pada lembaga-lembaga pengelola keuangan daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih tergolong langka. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk

menilai dampak dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pemahaman mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terhadap tingkat penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pemahaman mengenai sistem serta prosedur pengelolaan keuangan adalah elemen-elemen penting yang berpotensi memengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada lembaga pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pemahaman tentang sistem serta prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada pengolahan data numerik serta analisis statistik. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis secara objektif hubungan antarvariabel melalui teknik analisis statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Cukup Setuju (CS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Skala tersebut digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dengan jumlah sebanyak 43 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 43 responden. Variabel penelitian terdiri dari perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), serta pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan (X3) sebagai variabel independen, sedangkan penyerapan anggaran (Y) sebagai variabel dependen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penyerapan Anggaran

X₁ = Perencanaan Anggaran

X₂ = Pelaksanaan Anggaran

X₃ = Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

α = Konstanta

β₁ = Koefisien regresi Perencanaan Anggaran

β₂ = Koefisien regresi Pelaksanaan Anggaran

β₃ = Koefisien regresi Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

e = Standar error (kesalahan pengganggu)

Model ini diterapkan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh setiap variabel independen secara individu maupun bersamaan terhadap variabel dependen. Adapun metode pengujian dan analisis data dalam studi ini mencakup:

1. Uji Statistik Deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau gambaran umum data yang digunakan dalam penelitian.
2. Uji Instrumen Penelitian, yang meliputi uji validitas dan reliabilitas guna memastikan bahwa kuesioner yang digunakan layak serta mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten.
3. Uji Asumsi Klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi.
4. Uji Hipotesis, yang terdiri dari:
 - a. Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen
 - b. Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang diperoleh dalam penelitian, yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi pada setiap variabel yang diteliti. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Pemahaman terhadap Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (X3), serta Penyerapan Anggaran (Y)

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
TOTAL.PA	43	11	20	16.26	.340	2.226
TOTAL.PE	43	16	25	20.53	.316	2.074
TOTAL.PSPPK	43	13	20	16.65	.276	1.811
TOTAL.PY	43	14	20	17.02	.246	1.611
Valid N (listwise)	43					

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, terlihat bahwa semua variabel menunjukkan rata-rata yang cukup tinggi. Rata-rata tertinggi dicatat pada variabel Pelaksanaan Anggaran yang mencapai 20,53, sementara rata-rata terendah terdapat pada variabel Perencanaan Anggaran di angka 16,26. Hal ini mengindikasikan bahwa umumnya responden memandang pengelolaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dengan cukup positif.

3.1.2 Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel (0,3887), sehingga seluruh indikator dalam kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai

Cronbach’s Alpha pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60, sehingga seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Selain itu, dilakukan pula pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami multikolinearitas. Berikutnya, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa semua variabel memperoleh nilai signifikansi di atas 0,05, yang menandakan bahwa model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi semua asumsi klasik dan siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

3.1.3 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	7.431	2.672		2.781	.008		
	TOTAL.PA	.107	.101	.148	1.061	.295	.967	1.034
	TOTAL.PE	.308	.135	.397	2.287	.028	.628	1.592
	TOTAL.PSPPK	.091	.155	.102	.587	.561	.622	1.608

a. Dependent Variable: TOTAL.PY

Dari tabel 2, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$PSPPK = 7.431 + (0,107)X_1 + (0,308)X_2 + (0,091)X_3 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), serta Pemahaman terhadap Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (X3) memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Nilai konstanta sebesar 7,431 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengembangan pada ketiga variabel tersebut, Penyerapan Anggaran akan tetap berada pada nilai awal sebesar 7,431. Secara terpisah, variabel Perencanaan Anggaran menunjukkan koefisien 0,107, Pelaksanaan Anggaran 0,308, dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan 0,091, yang mengisyaratkan bahwa setiap tambahan satu unit pada masing-masing variabel akan mengakibatkan peningkatan pada Penyerapan Anggaran sesuai dengan nilai koefisiennya, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Di antara ketiga variabel tersebut, Pelaksanaan Anggaran menunjukkan dampak terbesar dan signifikan dengan nilai signifikan 0,028 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pelaksanaan anggaran semakin baik, maka tingkat penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang akan semakin meningkat.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Uji t

Uji ini digunakan untuk menilai secara parsial signifikansi dari setiap koefisien regresi dalam suatu model, agar dapat mengetahui dampak dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi dengan signifikan. Jika nilai thitung < tabel maka menunjukkan tidak ada pengaruh, dan jika thitung > tabel maka menunjukkan adanya pengaruh.

Tabel 3. Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.431	2.672		2.781	.008		
	TOTAL.PA	.107	.101	.148	1.061	.295	.967	1.034
	TOTAL.PE	.308	.135	.397	2.287	.028	.628	1.592
	TOTAL.PSPPK	.091	.155	.102	.587	.561	.622	1.608
a. Dependent Variable: TOTAL.PY								

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil uji t pada variabel perencanaan anggaran, diperoleh nilai thitung sebesar 1,061 yang lebih kecil daripada ttabel sebesar 2,021. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,295 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H1 ditolak dan H0 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- Berdasarkan hasil uji t pada variabel pelaksanaan anggaran, diperoleh nilai thitung sebesar 2,287 yang lebih besar daripada ttabel sebesar 2,021, dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H2 diterima dan H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- Berdasarkan hasil uji t pada variabel Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan, diperoleh nilai thitung sebesar 0,587 yang lebih kecil daripada ttabel sebesar 2,021, dengan nilai signifikansi sebesar 0,561 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H3 ditolak dan H0 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

3.2.2 Uji Determinasi

Uji adjusted R square merupakan cara yang memberikan gambaran akurat dan lebih tepat mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan mempertimbangkan jumlah dan tipe variabel yang ada dalam analisis regresi tersebut.

Tabel 4. Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.512 ^a	.262	.205	1.436
a. Predictors: (Constant), TOTAL.PSPPK, TOTAL.PA, TOTAL.PE				

Menurut Tabel di atas, nilai R-kuadrat yang telah dihitung adalah 0,208 atau 20,5%. Ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pemahaman mengenai sistem prosedur pengelolaan keuangan memberikan kontribusi sekitar 20,5% terhadap distribusi 79,5% dari periode tersebut, ketiganya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuraikan dalam penelitian ini.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Dampak Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

Berdasarkan pengujian secara individu, hasil menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Ini tercermin dari nilai signifikansi yang mencapai 0,295, yang lebih besar dari 0,05. Penemuan ini menandakan bahwa perencanaan anggaran yang disusun belum sepenuhnya mampu meningkatkan realisasi anggaran secara optimal.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa mutu perencanaan anggaran pada tahap awal masih kurang maksimal sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan anggaran. Dalam praktiknya, perencanaan anggaran di BPKAD lebih banyak bersifat administratif dan formalitas untuk memenuhi berbagai regulasi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kegiatan di lapangan. Rencana yang dibuat sering kali tidak memperhitungkan dengan komprehensif berbagai faktor penting, seperti kesiapan dokumen pendukung, kapasitas sumber daya manusia, dan dinamika kebijakan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2020) dan Ferdinand, Isnurrhadi, serta Marlina Widiyanti (2020) yang mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Realita ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perubahan kebijakan, keterlambatan dalam administrasi, serta ketidakcocokan antara rencana dan pelaksanaan kegiatan. Menurut Purwati, Arisyahidin, dan Talkah (2022), perencanaan anggaran adalah langkah menetapkan tujuan dan strategi organisasi yang dituangkan dalam rencana pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Namun, jika perencanaan tersebut tidak dibuat secara realistis dan tidak sesuai dengan kapasitas pelaksanaan, maka dampaknya pada penyerapan anggaran menjadi tidak signifikan.

Dalam konteks BPKAD, perencanaan anggaran yang telah dibuat sebagai panduan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten di semua tahapan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis, fleksibel, dan terintegrasi dengan kemampuan pelaksanaan untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran.

3.3.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran, terhadap Penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

erdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel Pelaksanaan Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif pelaksanaan anggaran yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran yang dapat dicapai.

Pelaksanaan anggaran adalah langkah implementasi dari rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Keefektifan dalam pelaksanaan anggaran mencerminkan kemampuan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketepatan waktu dalam proses pencairan dana, dan kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa. Elemen-elemen ini menjadi faktor utama yang mendukung optimalisasi penyerapan anggaran.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Purwati, Arisyahidin, dan Talkah (2022), Syahwildan dan Damayanti (2022), serta Errliyani dan Surlastiningsih (2023) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang efisien menunjukkan kelancaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, ketepatan dalam pencairan dana, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja. Menurut Patiran dan Bonsapia (2018), pelaksanaan anggaran adalah fase implementasi dari rencana anggaran yang mencakup proses internal satuan kerja, pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pembayaran. Jika semua proses tersebut berjalan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kendala dalam penyerapan anggaran dapat diminimalkan.

Dalam konteks BPKAD, pelaksanaan anggaran sangat krusial karena BPKAD adalah instansi yang bertanggung jawab atas proses penatausahaan, pencairan, dan pengendalian keuangan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan mendukung peningkatan penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

3.3.3 Pengaruh Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,561 yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan realisasi anggaran.

Meskipun aparatur memiliki pengetahuan tentang aturan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diaplikasikan secara efektif dalam pelaksanaan anggaran. Dengan kata lain, pemahaman yang bersifat normatif belum diterjemahkan dengan langsung menjadi peningkatan kinerja dalam penyerapan anggaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Derwi (2022), yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai prosedur pengelolaan keuangan tetap tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para pegawai memahami aturan dan prosedur yang ada, penyerapan anggaran masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan pimpinan, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan yang ada.

Menurut Widiawati (2019), pemahaman tentang prosedur pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan kemampuan pegawai dalam memahami sistem akuntansi dan laporan keuangan yang berlaku. Namun, pemahaman ini harus diterapkan secara konsisten agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penyerapan anggaran.

Dalam konteks BPKAD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah telah terstandarisasi dan bersifat baku, sehingga tingkat pemahaman aparatur cenderung seragam. Akibatnya, variasi dalam pemahaman antarpegawai tidak cukup signifikan untuk memengaruhi perbedaan dalam tingkat penyerapan anggaran. Selain itu, kompleksitas prosedur dan regulasi pengelolaan keuangan daerah juga bisa menjadi kendala tersendiri dalam proses realisasi anggaran.

Dengan demikian, peningkatan penyerapan anggaran tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap prosedur keuangan, tetapi juga memerlukan penguatan koordinasi antarunit kerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta menyederhanakan proses administrasi pengelolaan keuangan daerah.

4. KESIMPULAN

Perencanaan anggaran tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ini menunjukkan bahwa rencana anggaran yang telah dibuat belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan realisasi anggaran secara efektif.

Perencanaan yang bersifat administratif dan formal, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi nyata saat pelaksanaan, mengakibatkan perencanaan tersebut belum berperan secara efisien sebagai alat kontrol penyerapan anggaran. Penerapan anggaran memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ini menunjukkan bahwa semakin baik cara pelaksanaan anggaran, semakin tinggi pula tingkat penyerapan yang dapat dicapai.

Pelaksanaan yang teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan serta prosedur yang ada dapat meningkatkan realisasi anggaran secara maksimal. Pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman pegawai tentang sistem serta prosedur pengelolaan keuangan belum menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan realisasi anggaran. Penyerapan anggaran lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti efektivitas pelaksanaan kegiatan, kerja sama antar unit, dan ketepatan waktu dalam administrasi pencairan dana.

REFERENSI

- [1] A. T. Purwati Indah, Arisyahidin, “Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri Indah,” vol. 21, pp. 244–261, 2021.
- [2] H. Yuniati and Anne Putri, “Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh,” *JEMSI (Jurnal Ekon. Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 9, no. 5, pp. 1886–1899, 2023, doi: 10.35870/jemsi.v9i5.1498.
- [3] P. M. A. Safpremi Yolla, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Desa,” *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 177–185, 2025, doi: 10.51903/5c3mj829.
- [4] S. Furqana and D. F. Handayani, “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar,” *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 513–529, 2022, doi: 10.24036/jea.v4i3.546.
- [5] Anfujatin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Skpd Kabupaten Tuban,” vol. 14, no. 1, pp. 1–18, 2016.
- [6] E. Erliyani and S. Sulastiningsih, “Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Aplikasi Sipd Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Magelang,” *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 3, no. 4, pp. 1279–1303, 2023, doi: 10.32477/jrabi.v3i4.854.
- [7] mohamad adam ferdinan, isnurhadi, marlinawidiyanti, “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia,” vol. 17, no. 2, pp. 117–134, 2020.
- [8] D. Zainah Monik, “Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara Monik,” <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/>, vol. 5, no. 1, pp. 90–97, 2016.
- [9] A. Dhea, “Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus Di Dinas Ppkukm Dki Jakarta),” 2025.
- [10] W. Kadek wirastuti, G. A. Yuniarta, and E. Sujana, “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi,” *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) Undiksha*, vol. 15, no. 01, pp. 119–130, 2024, doi: 10.23887/jimat.v15i01.63339.
- [11] M. Nurfajriyati, Rivandi, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kantor Inspektorat Kota Padang Sumatera Barat Nurfajriyati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP,” *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 357–368, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2412>
- [12] N. A. Hasana and G. Hamdani, “Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Finansial terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah,” *J. Ekon. Kop. Kewirausahaan*, vol. 14, no. 7, p. 2023, [Online]. Available: <https://journal.ikopin.ac.id>
- [13] G. H. Putra and Z. Sepriadi, “Senjangan Anggaran Dipengaruhi Oleh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Di SKPD Provinsi Sumatera Barat,” *J. PUNDI*, vol. 6, no. 1, May 2022, doi: 10.31575/jp.v6i1.397.
- [14] M. Rivandi and M. M. Gea, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah Pusat),” *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 19, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.29040/jap.v19i1.167.